

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2019 Kecamatan Sambeng ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan kewajiban dan sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, yang mewajibkan instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan kebijakan berdasarkan evaluasi dan analisis capaian kinerja kegiatan dan sasaran yang mengacu pada RENSTRA Kabupaten Lamongan Tahun 2016 - 2021.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini masih banyak kekurangannya, sehingga kritik, saran dan masukan yang sifatnya membangun dari semua pihak kami harapkan untuk kesempurnaan dalam penyusunan LPPD di tahun-tahun yang akan datang.

Akhirnya dengan memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT, semoga Aparat Pemerintah Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan mampu mengemban dan melaksanakan tugas-tugas serta kewajiban sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Sambeng, Maret 2020
CAMAT SAMBENG

HERSAD,SH.MM
Pembina
NIP. 19630603 198603 1 021

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Dasar Hukum.....	1
B. Gambaran Umum Daerah	1
BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH	7
A. Visi dan Misi	7
B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah	8
C. Prioritas Daerah	8
BAB III RINGKASAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	9
A. Ringkasan Urusan Kewilayahan	9
BAB IV REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAHAN.....	24
BAB V TUGAS PEMBANTUAN	25
A. Tugas Pembantuan Yang diberikan	25
BAB VI TUGAS UMUM PEMERINTAHAN	27
BAB VII PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM.....	28
BAB VIII AKUNTABILITAS KINERJA INTANSI PEMERINTAH.....	29
BAB IX PENUTUP.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Dasar Hukum penyusunan LPPD tertuang dalam PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tentang Pemerintahan Daerah serta PP Nomor 03 Tahun 2007 LPPD yang tertuang di dalam Pasal 1 Ayat 8 PP Nomor 3 Tahun 2007 , LPPD adalah Laporan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (Satu) tahun Anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang di sampaikan oleh oleh Kepala Daerah kepada Kepala Pemerintahan.

B. GAMBARAN UMUM DAERAH

Sebagaimana telah diamanatkan dengan undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwasanya Kecamatan merupakan Perangkat Daerah dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggung jawab kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugasnya seorang camat melaksanakan tugas – tugas yang diberikan oleh Bupati sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat.

Selanjutnya untuk mewujudkan jalannya penyelenggaraan Pemerintahan yang baik diperlukan adanya suatu rencana kerja jangka panjang menengah (5 tahun) yang dikenal dengan Rencana Strategik (RENSTRA) Kecamatan Sambeng Tahun 2016 - 2021, disamping itu untuk panduan penyelenggaraan pemerintahan untuk jangka pendek (1 tahunan) diperlukan Rencana Kerja 1 tahun yang dikenal dengan Program Kerja Tahunan.

Untuk itu dalam rangka memberi arah pada penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan disusunlah Program Kerja tahunan Kecamatan Sambeng tahun 2019.

C. KONDISI GEOGRAFIS DAERAH

Secara Geografis Kecamatan Sambeng berada dibagian Barat Wilayah Kabupaten Lamongan, dengan batas wilayah :

- Sebelah Barat : Kecamatan ngimbang
- Sebelah Timur : Kecamatan mantup
- Sebelah Utara : Kecamatan sugio
- Sebelah Selatan : Kecamatan kudu kab.jombang

Luas wilayah Kecamatan Sambeng 144,57 Km² berdasarkan tata guna tanah terdiri dari :

- Tanah sawah : 3.408,84 ha.
- Tegal : 1.649,14 ha.
- Pekarangan : 397,45 ha.
- Tanah hutan : 4.398,13 ha.
- Tanah lainnya : 475,29 ha.

Dan merupakan dataran rendah dengan ketinggian kurang dari 60 m di atas permukaan air laut.

Tabel 1.1
Data Luas Wilayah, Jumlah Desa dan Dusun
Menurut
Kecamatan se Kabupaten Lamongan

No.	Kecamatan	Luas Wilayah	Jumlah	
		(Km ²)	Desa/Kel	Dusun
1	Sambeng	144,57	22	86
Jumlah		144,57	22	86

Batas administrasi daerah yang dianggap perlu khusus untuk Kabupaten adalah jumlah bangunan rumah dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.2
Data Jumlah Rumah
Menurut
Kecamatan se Kabupaten Lamongan

No	Kecamatan	Jumlah Bangunan Rumah	Ket
1	Sambeng	16.789	
	Jumlah	16.789	

1. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS

Tabel 2.1
Data Jumlah Penduduk Kabupaten Lamongan
Menurut
Jenis Kelamin dan Jumlah Kepala Keluarga Per Kecamatan Tahun 2019

No.	Kecamatan Sambeng	Penduduk		Jumlah	Jumlah KK
		Laki-laki	Perempuan		
1	Ardirejo	1.736	1.756	3.492	1.249
2	Barurejo	769	804	1573	510
3	Candisari	1.862	1.774	3.636	1.137
4	Garung	1.146	1.154	2.300	745
5	Gempol manis	1.317	1.267	2.584	803
6	Jatipandak	1.113	1.089	2.202	794
7	Kedungbanjar	153	149	302	84
8	Kedungwangi	2.040	2.055	4.095	1.345
9	Kreteranggon	2.217	2.180	4.397	1.391
10	Nogojatisari	1.072	1.109	2.181	768
11	Pamotan	1.625	1.670	3.295	1.246
12	Pasarlegi	972	934	1.906	631
13	Pataan	1.831	1.866	3.697	1.292
14	Sekidang	410	404	814	276

No.	Kecamatan Sambeng	Penduduk		Jumlah	Jumlah KK
		Laki-laki	Perempuan		
15	Selorejo	911	960	1.871	594
16	Semampirejo	1.228	1.171	2.399	759
17	Sidokumpul	1.667	1.585	3.252	1.016
18	Sumbersari	986	991	1.977	712
19	Tenggiring	994	946	1.940	641
20	Wateswinangun	1.783	1.718	3.501	1.157
21	Wonorejo	823	854	1.677	511
22	wudi	1.040	1.017	2.057	590
Jumlah		27.695	27.453	55.148	18.251

Selanjutnya untuk jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Struktur Penduduk
Menurut
Usia Dan Jenis Kelamin Kecamatan Sambeng Tahun 2019

STRUKTUR USIA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
≥ 60	2.627	2.625	5.252
55-59	1.561	1.556	3.117
50-54	1.871	1.827	3.698
45-49	1.875	1.867	3.646
40-44	2.018	2.040	4.058
35-39	2.037	2.033	4.070
30-34	1.958	1.945	3.903
25-29	1.928	1.905	3.833
20-24	1.984	1.988	3.958
15-19	1.871	1.864	3.735
10-14	1.792	1.779	3.571

5-9	1.645	1.668	3.313
0-4	1.732	1.693	3.425
Jumlah	24.899	24.788	49.689

- Angka Sementara

Adapun komposisi penduduk usia kerja yang bekerja menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3

Data Komposisi Penduduk Menurut Pekerjaan Tahun 2019

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	%
1	2	3	4
A	Bekerja		
1	Petani	29.036	58,4%
2	Pedagang	1.178	2,4%
3	Industri	152	0,3%
4	Jasa Kemasyarakatan	215	0,4%
5	Kontruksi	142	0,3%
6	Pemerintahan	969	2,0%
7	Swasta	1.960	3,9%
8	Wiraswasta	2.367	4,8%
9	Lainnya	1.759	3,5%
	Jumlah	37.778	76%
B	Tidak/Belum Bekerja		
1	Tidak Bekerja	6.033	12,1%
2	Pelajar/Mahasiswa	5.878	11,8%
	Jumlah	11.911	24%
	Jumlah Total	49.689	100%

Adapun komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2019

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah *)
1	SD/ MI (%)	20.468 41%
2	SLTP (SMP/ MTs) (%)	10.579 21%
3	SLTA (SMU/ SMK/ MA) (%)	7.898 16%
4	D1 ke atas (D1/ D2/ D3/ D4/ PT) (%)	1.444 3%
Jumlah (%)		49.689 100%

2. KONDISI EKONOMI

a. Potensi Unggulan Daerah

Adapun sektor unggulan Kecamatan Sambeng tersebut antara lain :

1. Sektor pertanian
2. Sektor industri pengolahan
3. Sektor bangunan / konstruksi,
4. Sektor perdagangan, Sektor jasa (khususnya sub sektor sosial dan kemasyarakatan, dan perorangan dan rumah tangga).

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD)

A. VISI DAN MISI

1. VISI

”Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera Dan Berdaya Saing”

Dari visi tersebut menggambarkan harapan terwujudnya pelayanan prima kepada semua lapisan masyarakat Kecamatan Sambeng, yang lebih mantap, terarah, terkendali dan berkesinambungan serta merangsang masyarakat untuk lebih maju, mandiri dan sejahtera.

2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Adapun misi Kecamatan Sambeng sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan
2. Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah
3. Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan
4. Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik
5. Memantapkan kehidupan masyarakat yang tentram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal

Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Instansi Pemerintah, mengetahui peran dan program - program serta hasil yang akan diperoleh di Tahun 2019.

Dari gambaran tersebut diatas, maka ditetapkan misi OPD Kecamatan Sambeng Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Urusan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran.
2. Urusan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Urusan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Urusan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Urusan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
6. Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH

1. STRATEGI

2. ARAH KEBIJAKAN DAERAH

C. PRIORITAS DAERAH

BAB III
RINGKASAN FUNGSI PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. RINGKASAN URUSAN KEWILAYAHAN

1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyelenggarakan urusan wajib adalah semua OPD di Kabupaten Lamongan dengan pembagian berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi dari masing – masing OPD. Adapun rincian OPD Penyelenggara masing –masing urusan wajib adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Penyelenggara Urusan Wajib

NO	URUSAN	OPD YANG MENYELENGGARAKAN
1.	Kewilayahan	Kecamatan Sambeng

2. Program dan Kegiatan

Urusan Adminstrasi Umum Pemerintahan di Kabupaten Lamongan pada Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Sambeng melalui 6 Program dan 17 kegiatan, adapun program dan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Perkantoran
 - b. Penyediaan Barang Pakai Habis
- 2) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur sebesar terdiri dari kegiatan:
 - a. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - c. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
 - d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari kegiatan:
- a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari kegiatan:
- a. Penyusunan Laporan Keuangan Secara Berkala
 - b. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi
- 5) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan terdiri dari kegiatan:
- a. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
- 6) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan terdiri dari kegiatan:
- a. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
 - b. Pembinaan Organisasi Kepemudaan
 - c. Pengendalian Keamanan Lingkungan
 - d. Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan PERDES
 - e. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - f. Pembinaan Kesadaran Kebersihan Masyarakat
 - g. Fasilitasi Kemiskinan

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional

Penyelenggaraan Urusan Kewilayahan khususnya urusan wilayah Pemerintah daerah melibatkan berbagai elemen masyarakat termasuk didalamnya adalah Aparatur Daerah. Berikut diuraikan jumlah pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan serta jumlah pejabat struktural dan fungsional :

No	Jabatan Struktural	Jml	Pangkat/Gol. Ruang	Jml	Pendidikan formal	Jml	Ket
1.	Camat	1	Pembina (IV/a)	1	S-2	1	
2.	Sekretaris Kecamatan	1	Penata Tk.I (III/d)	1	S-2	1	
3.	Kepala Seksi	4	Penata Tk I (III/d)	4	S-1	1	
4.	Kasubag Umum	1	Penata (III/c)	1	SMA	1	
	Kasubag Keuangan	1	Penata Muda (III/b)	1	S1	1	
5.	Staf.		Penata Tk I (III/d)	-			
			Penata Muda Tk I (III/b)	2			
			Penata Muda (III/a)	2			
			Pengatur Tk I (II/d)	-			
			Pengatur (II/c)	7			
			Pengatur Muda Tk.I (II/b)				
			Tenaga Kontrak Kabupaten	4			
			TenagaKontrak Kecamatan	6			

- 1) Dilihat dari Tingkat Pendidikan

Tabel 3.2
Jumlah Pegawai yang Masuk dalam urusan Kewilayahan
Menurut Tingkat Pendidikan

No	URAIAN	JENJANG PENDIDIKAN							
		SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2
1	Kantor Kecamatan Sambeng	1		8				12	1
JUMLAH		1		8				12	1

- 2) Dilihat dari Pangkat dan Golongan

Tabel 3.3
Jumlah Pegawai yang Masuk dalam urusan Kewilayahan
Menurut Pangkat dan Golongan

No	URAIAN	GOLONGAN			
		I	II	III	IV
1	Kantor Kecamatan Sambeng	-	7	10	1
JUMLAH		-	7	10	1

- 3) Dilihat dari Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Tabel 3.4
Jumlah Pegawai yang Masuk dalam urusan Kewilayahan
Menurut Jabatan

No	URAIAN	ESELON						FUNGSIONAL	STAF
		II/a	II/b	III/a	III/b	IV/a	IV/b		
1	Kantor Kecamatan Sambeng			1		4			

4. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi dan realisasi anggaran belanja untuk masing-masing program adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.5

Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wilayah

No	Urusan Wajib	Belanja tidak langsung	Belanja tidak langsung			Belanja Langsung	Belanja langsung			Total Realisasi Belanja
			Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	
1	2	3	5	6	7	8	10	11	12	13
	BELANJA URUSAN WILAYAH	1.941.570.000	1.941.570.000	0	0	974.741.400	169.604.000	542.637.400	262.000.000	2.777.997.396

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan anggaran Rp. 286.740.100,00 realisasi Rp. 251.018.760,00 (87,54 %)
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan anggaran Rp. 386.400.000,00 realisasi Rp. 366.728.000,00 (94%)
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan anggaran Rp. 11.500.000,00 realisasi Rp. 10.575.000,00 (91%)
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan anggaran Rp. 43.600.000,00 realisasi Rp. 31.021.000,00 (71%)
- Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan, dengan anggaran Rp. 40.000.000,00 realisasi Rp. 40.000.000,00 (100%)
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan, dengan anggaran Rp. 160.000.000,00 realisasi Rp. 141.065.416,00 (88%)

Adapun capaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan diuraikan sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pelaksanaan program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dijabarkan dalam 1 (satu) program dan 2 (dua) kegiatan dengan didukung dana sebesar Rp. 286.740.100,00 dan realisasinya sebesar Rp. 251.018.760,00 atau 87% sedangkan realisasi masing-masing adalah sebagai berikut :

- 1) Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
Sasaran : Kantor Kec. Sambeng
Dana : Rp. 286.740.100,00
Realisasi : Rp. 251.018.760,00
Keluaran : – Penyediaan Jasa Perkantoran
– Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran
Outcome : – Terlaksananya partisipasi musyawarah dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang dijabarkan dalam 1 (satu) program dan 4 (empat) kegiatan dengan didukung dana sebesar Rp. 386.400.000,00 dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 366.728.000,00 atau 94% sedangkan realisasi masing - masing adalah sebagai berikut :

- 1) Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Sasaran : Gedung Kantor Kec Sambeng
Dana : Rp. 386.400.000,00
Realisasi : Rp. 366.728.000,00
Keluaran : – Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

- Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor
 - Rehabilitasi sedang/ berat Gedung Kantor
 - Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
- Outcome : – Terpenuhinya perlengkapan Kantor
- Terjaganya kualitas bangunan gedung kantor
 - Terjaganya kondisi yang layak jalan untuk kendaraan dinas / operasional

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pelaksanaan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang dijabarkan dalam 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan dengan didukung dana sebesar Rp. 11.500.000,00 dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 10.575.000,00 atau 91% sedangkan realisasi masing - masing program adalah sebagai berikut :

- 1) Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Sasaran : Pegawai Aparatur
- Dana : Rp. 11.500.000,00
- Realisasi : Rp. 10.575.000,00
- Keluaran : – Pendidikan dan Pelatihan Formal
- Outcome : – Keikutsertaan Sumber Daya Aparatur

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pelaksanaan yang Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dijabarkan dalam 1 (satu) program dan 2 (dua) kegiatan dengan didukung dana sebesar Rp. 43.600.000,00 dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 31.021.000,00

atau 71 % sedangkan realisasi masing - masing program adalah sebagai berikut :

- 1) Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Sasaran : Pegawai Aparatur
- Dana : Rp. 43.600.000,00
- Realisasi : Rp. 31.021.000,00
- Keluaran : – Penyusunan Laporan Keuangan secara Berkala
– Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi
- Outcome : – Terselenggaranya Laporan Keuangan capaian Kinerja yang tepat waktu
– Terselenggaranya Laporan Keuangan Semesteran yang Tepat Waktu
– Terselenggaranya Laporan Akhir Tahun yang Tepat Waktu
– Terselenggaranya Pelaporan Rencana dan Strategis Kegiatan

e. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan

Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan yang dijabarkan dalam 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan dengan didukung dana sebesar Rp. 40.000.000,00 dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 40.000.000,00 atau 100% sedangkan realisasi masing - masing program adalah sebagai berikut :

- 1) Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
- Sasaran : Masyarakat Kec. Sambeng
- Dana : Rp. 40.000.000,00
- Realisasi : Rp. 40.000.000,00

Keluaran : – Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Outcome : – Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dapat beroperasi dengan baik

– Meningkatnya Pelayanan Jasa Administrasi Kegiatan

f. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan Pelaksanann Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan yang dijabarkan dalam 1 (satu) program dan 6 (enam) kegiatan dengan didukung dana sebesar Rp. 160.000.000,00 dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 141.065.416,00 atau 88 % sedangkan realisasi masing - masing program adalah sebagai berikut :

1) Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan

Sasaran : Masyarakat Kec. Sambeng

Dana : Rp. 160.000.000,00

Realisasi : Rp. 141.065.416,00

Keluaran : – Pelaksaannya Musrenbang

– Pembinaan Organisasi Kepemudaan

– Pengendalian Keamanan Lingkungan

– Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan Perdes

– Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

– Pembinaan Kesadaran Kebersihan Masyarakat

Outcome : – Terlaksananya partisipasi musyawarah pelaksanaan perencanaan pembangunan

5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam merumuskan Program Kerja Pembangunan Kecamatan Sambeng, di dahului dengan proses Perencanaan yang mengacu kepada Rencana Sasaran Strategis yang telah disusun selama 5 tahun. Rencana Sasaran Strategis (Renstra) menjadi acuan utama karena didalamnya berisikan sasaran, Tujuan yang telah di sesuaikan dengan Program dan sasaran yang ada di RPJMD Kabupaten Lamongan.

6. Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan semua urusan Wilayah diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Berikut disampaikan tentang kondisi sarana dan prasarana yang digunakan di Kecamatan Sambeng. Jumlah Aset Tetap Kecamatan Sambeng Tahun 2019 sebesar Rp. 3.209.375.100,00 dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar Rp. 2.813.796.156,00 sehingga ada kenaikan sebesar Rp. 395.578.944,00 atau sebesar 9,46%

RINCIAN ASET OPD KECAMATAN SAMBENG MENURUT KONDISI TAHUN 2019

No	OPD Kecamatan Sambeng	BARANG (Unit)			NILAI (Rp)		
		BAIK	RUSAK Atau Tidak Dikuasai	JUMLAH	BAIK	RUSAK Atau Tidak Dikuasai	JUMLAH
1	2	3	4	5 = (3+4)	6	7	8 = (6+7)
1	Tanah Bangunan Kantor	1	-	1	622.500.000.00	-	622.500.000.00
2	Gedung Bangunan	11	-	11	1.150.869.369.00	-	1.150.869.369.00
3	Instalasi jaringan/Menara	2	-	2	10.000.000	-	17.500.000
4	Mobil	1	-	1	239.810.000.00	-	239.810.000
5	Sepeda Motor	51	-	51	684.444.500.00	-	684.444.500.00

No	OPD Kecamatan Sambeng	BARANG (Unit)			NILAI (Rp)		
		BAIK	RUSAK Atau Tidak Dikuasai	JUMLAH	BAIK	RUSAK Atau Tidak Dikuasai	JUMLAH
1	2	3	4	5 = (3+4)	6	7	8 = (6+7)
6	Lemari Besi/Kayu	7	-	7	25.500.000	-	25.500.000
7	Filling Besi/Metal	3	-	3	6.300.000	-	6.300.000
8	Papan Elektronik	1	-	1	16.000.000	-	16.000.000
9	Lain – Lain	1	-	1	7.000.000	-	7.000.000
10	Kursi Tamu	2	-	2	8.725.000	-	8.725.000
11	Meja Rapat	5	-	5	25.266.000	-	25.266.000
12	Meja Resepsionis	1	-	1	31.924.000	-	31.924.000
13	Bangku Tunggu	2	-	2	5.757.000	-	5.757.000
14	AC Unit	8	-	8	36.831.000	-	36.831.000
15	Lain – Lain (Genset)	1	-	1	22.500.000	-	22.500.000
16	Tombol Kebakaran	1	-	1	2.000.000	-	2.000.000
17	PC Unit/ Komputer	17	-	17	134.767.100	-	134.767.100
18	Notebook	3	-	3	23.120.000	-	23.120.000
19	Printer	25	-	25	90.639.600	-	90.639.600
20	Meja Kerja	16	-	16	1.600.000	-	1.600.000
21	Kursi Kerja	7	-	7	8.855.000	-	8.855.000
22	Camera	1	-	1	3.000.000	-	3.000.000
23	Photo Processing	2	-	2	23.500.000	-	23.500.000
24	Lain – lain	2	-	2	6.000.000	-	6.000.000
25	UPS	1	-	1	1.707.820	-	1.707.820
26	Switch Hub	1	-	1	4.213.700	-	4.213.700
27	Mesin Absensi	1	-	1	4.149.000	-	4.149.000
28	Kipas Angin	1	-	1	13.996.000	-	13.996.000
JUMLAH		166	-	166	3.209.375.100	-	3.209.375.100

7. Permasalahan Dan Solusi

1. Permasalahan

- Sumber Daya Manusia (SDM) /Tenaga Administrasi PNS di Kantor Kecamatan Sambeng masih kurang
- Belum adanya Tenaga Teknis IT
- Sebagian perangkat desa belum memahami tupoksi dan belum terisi secara keseluruhan
- Perlu peningkatan sistem pengelolaan manajemen keuangan
- Sarana dan Prasarana pendukung administrasi masih kurang

2. Solusi

- Perlu penambahan personil tenaga administrasi PNS/staf
- Perlu adanya tenaga teknis IT
- Perlu Pelatihan/ Bimtek Perangkat Desa dan pengisian Perangkat Desa
- Perlu adanya pembinaan dari Instansi terkait
- Perlu pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung

8. Pengelolaan Belanja Daerah

a. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Tabel 3.6
Struktur Belanja APBD Kabupaten Lamongan
Tahun Anggaran 2019

Kode	Jenis belanja	Jumlah Anggaran (Rp)	Prosentase (%)
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.842.960.000,-	98,00%
2.1.1	Belanja Pegawai	1.842.960.000,-	98,00%
2.1.2	Belanja Bunga	-	
2.2	BELANJA LANGSUNG	911.240.100,-	86,00%
2.2.1	Belanja Pegawai	183.038.000,-	97,84%
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	183.038.000,-	89,27%
2.2.3	Belanja Modal	236.775.000,-	99,81%
Jumlah		2.754.2001400,-	95,26%

b. Target dan Realisasi Belanja

Tabel 3.7
Target dan Realisasi Belanja APBD Kabupaten Lamongan
Tahun Anggaran 2019

Kode	Jenis Belanja	Akhir Tahun 2019		
		Target		Realisasi Belanja
		Jumlah (Rp.)	Proporsi (%)	(Rp.)
2.1	Belanja tidak langsung	1.737.130.000		1.667.281.595.000
2.1.1	Belanja pegawai	1.737.130.000		1.667.281.595.000
2.2	Belanja langsung	928.240.100		840.408.770
2.2.1	Belanja pegawai	329.813.000		327.344.500
	Belanja Barang Jasa	487.027.100		401.663.676
	Belanja Modal	258.175.000		257.921.000
	Jumlah	2.665.360.100		2.507.689.771.000

B. INDIKATOR KINERJA KUNCI

1. Aspek Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang di tetapkan oleh Pemerintah cq Kementerian / LPN. Keberadaan SOP :

- SOP tentang IMB
- SOP tentang HO
- SOP tentang Pelayanan Legalisasi
- SOP tentang Kenaikan Pangkat PNS
- SOP tentang Pengadministrasian Pegawai
- SOP tentang KTP
- SOP tentang KK
- SOP tentang Pindah Tempat

2. Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang – Undangan

Keberadaan Peraturan (Perda / Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan : Perda Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan.

3. Aspek Penataan Kelembagaan Daerah

Rasio Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi 1:1 yaitu 8 dari total jumlah keseluruhan Pejabat 8 orang, sedangkan keberadaan Jabatan Fungsional 0.

4. Pengelolaan Kepegawaian Daerah

Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap total PNS Kecamatan Sambeng sebanyak **18** Personil. Jumlah PNS Kabupaten Lamongan sebanyak 9.159 Personil.

5. Perencanaan Pembangunan Daerah

Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki perangkat daerah. Keberadaan Dokumen Perencanaan yaitu Renja, Renstra, dan DPA/RKA.

Jumlah Program pada Kantor Kecamatan Sambeng sebanyak 6 Program :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ;
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ;
- Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan ;
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan.

6. Pengelolaan Keuangan Daerah

Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD sebesar 0,096% dari total Belanja APBD sebesar Rp : 2.665.360.100,-. Total Belanja Perangkat Daerah Kecamatan Sambeng sebesar Rp. 2.507.689.771,-, yang terdapat pada Laporan Keuangan yang tersusun dalam SPJ Fungsional, Naraca dan Calk

7. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Manajemen asset Perangkat Daerah terdapat pada KIB A, B, C, D, E, F, dan KIR sebesar Rp. 3.209.375.100,-.

8. Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat

Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat berupa Papan Informasi, Kotak Saran, Informasi Fasilitas Pelayanan, Media Masa (Instagram, website, facebook), dan Pos Pengaduan.

BAB IV
REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAHAN
(RKP) TAHUN 2019

KODE					URAIAN	APBD PAK 2019	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik (%)	
1					2	3	4	5	
6	1	1	20		KEWILAYAHAN				
6	1	1	20	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
6	1	1	20	1	1	Penyediaan Jasa Perkantoran	166.740.100,00	157.645.260,00	94,55 %
6	1	1	20	1	2	Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran	120.000.000,00	93.373.500,00	77,81 %
6	1	1	20	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
6	1	1	20	2	3	Pengadaan Peralatan dan Pengadaan Gedung Kantor	71.400.000,00	71.400.000,00	100 %
6	1	1	20	2	4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	130.000.000,00	120.700.000,00	92,85 %
6	1	1	20	2	6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	150.000.000,00	149.746.000,00	99,75 %
6	1	1	20	2	7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	35.000.000,00	24.882.000,00	71,09 %
6	1	1	20	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
6	1	1	20	5	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	11.500.000,00	10.575.000,00	91,96 %
6	1	1	20	6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
6	1	1	20	6	1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Secara Berkala	13.600.000,00	10.121.000,00	74,42 %
6	1	1	20	6	2	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	30.000.000,00	20.900.000,00	69,67 %
6	1	1	20	15		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan			
6	1	1	20	15	1	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	40.000.000,00	40.000.000,00	100 %
6	1	1	20	17		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan			
6	1	1	20	17	1	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan	10.000.000,00	9.725.000,00	97,25 %
6	1	1	20	16	1	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	10.000.000,00	9.925.000,00	99,25 %
6	1	1	20	15	3	Pengendalian Keamanan Lingkungan	20.000.000,00	20.000.000,00	100 %
6	1	1	20	17	6	Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan PERDES	50.000.000,00	35.738.000,00	71,48 %
6	1	1	20	17	5	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	100 %
6	1	1	20	17	11	Fasilitasi Kemiskinan	15.000.000,00	10.959.000,00	73,06 %
6	1	1	20	17	12	Fasilitasi Dana Desa	20.000.000,00	19.718.416,00	98 %
6	1	1	20	17	14	Fasilitasi pengembangan potensi ekonomi	15.000.000,00	15.000.000,00	100 %
JUMLAH						928.240.100,00	840.408.176,00	90.54 %	

BAB V
TUGAS PEMBANTUAN

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

1. Dasar Hukum

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 58 tahun 2012, tentang penjabaran APBD Kabupaten Lamongan tahun 2012.
- 2) Keputusan Bupati Lamongan nomor 188/ 75 /413.031/2013 tentang Lokasi Dana Alokasi Program ADD Kabupaten Lamongan

2. Urusan Pemerintahan yang ditugas Pembantuankan

Urusan pemerintahan yang ditugas pembantuankan kepada desa adalah Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2019

3. Sumber dan Jumlah Anggaran

a. Alokasi Dana Desa (ADD)

Sumber Anggaran : APBD Kabupaten Lamongan
Jumlah Anggaran : Rp. **6.908.914.200**

NO	KECAMATAN / DESA	ADD	TOTAL ADD	Ket	
1	2	3	4	5	
1	SAMBENG				
	1	Ardirejo	328.596.300	329.254.200	
	2	Barurejo	337.925.000	338.467.800	
	3	Candisari	352.019.100	352.765.500	
	4	Garung	310.612.800	311.551.500	
	5	Gempol manis	334.994.800	335.772.400	
	6	Jatipandak	308.778.800	309.441.400	
	7	Kedungbanjar	258.153.300	258.570.200	
	8	Kedungwangi	308.034.500	308.686.100	
	9	Kreteranggon	380.417.200	381.282.900	
	10	Nogojatisari	342.162.400	343.043.600	

NO	KECAMATAN / DESA		ADD	TOTAL ADD	Ket
1	2		3	4	5
	11	Pamotan	336.741.200	337.544.100	
	12	Pasarlegi	285.075.100	285.644.800	
	13	Pataan	359.689.100	360.546.300	
	14	Sekidang	282.082.500	282.609.100	
	15	Selorejo	323.086.800	323.692.400	
	16	Semampirejo	288.791.400	289.414.800	
	17	Sidokumpul	284.094.000	284.650.000	
	18	Sumbersari	285.876.000	286.458.000	
	19	Tenggiring	290.968.400	291.623.300	
	20	Wateswinangun	315.414.000	316.172.300	
	21	Wonorejo	295.289.200	296.006.500	
	22	Wudi	285.145.700	285.145.700	
	Jumlah		6.893.922.200	6.908.914.200	

4. Kondisi Sarana dan Prasarana Hasil Alokasi Dana Desa Tahun 2019

1) Kecamatan Sambeng

NO	DESA	KEGIATAN	BIAYA (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	Ardirejo		328.569.300	329.254.200
2	Barurejo		337.925.000	338.467.800
3	Candisari		352.019.100	352.765.500
4	Garung		310.612.800	311.551.500
5	Gempol manis		334.994.800	335.772.400
6	Jatipandak		308.778.800	309.441.300
7	Kedungbanjar		358.153.300	258.570.200
8	Kedungwangi		308.034.500	308.686.100
9	Kreteranggon		380.417.200	381.282.900
10	Nogojatisari		342.162.400	343.043.600
11	Pamotan		337.741.200	327.544.100
12	Pasarlegi		285.075.100	285.644.800
13	Pataan		359.689.100	360.246.300
14	Sekidang		282.028.500	282.609.100
15	Selorejo		323.086.800	323.692.400
16	Semampirejo		288.791.400	289.414.800
17	Sidokumpul		384.095.000	284.650.000
18	Sumbersari		285.876.000	286.458.000
19	Tenggiring		290.968.400	291.623.300
20	Wateswiangun		315.414.000	316.172.300
21	Wonorejo		295.289.200	296.006.500
22	Wudi		285.145.700	285.716.500

BAB VI

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah kabupaten di wilayah kerjanya, yang mencakup bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, kesejahteraan rakyat dan pembinaan kehidupan masyarakat serta urusan pelayanan umum lainnya yang diserahkan Bupati.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Pengorganisasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- b. Pengorganisasian kegiatan pembinaan dan pengembangan perekonomian rakyat dan melaksanakan pemungutan pendapatan daerah sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan;
- c. Penyelenggaraan pelayanan sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
- d. Pembinaan kelurahan;
- e. Pelaksanaan dukungan administrasi di bidang pendidikan sekolah dasar;
- f. Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah kecamatan;
- g. Pelaksanaan koordinasi, operasional unit pelaksana teknis dinas / badan; dan
- h. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan partisipasi masyarakat.

BAB VIII

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pembentukan Kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai dan mengelola anggaran tersendiri sehingga wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Pemerintah Kabupaten Lamongan menindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Lamongan dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 49 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kecamatan.

2. Gambaran Umum Organisasi

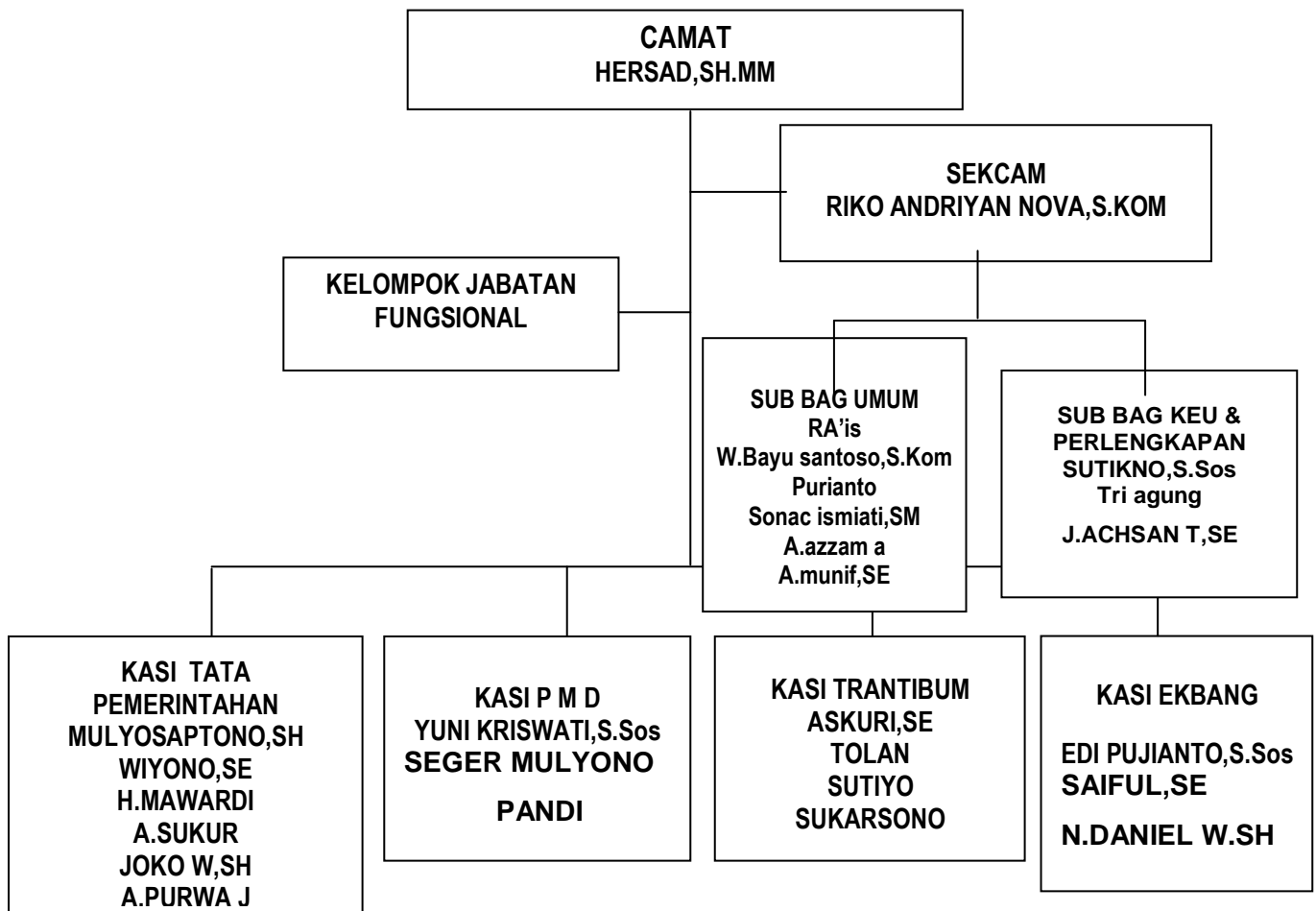
Bahwa dalam rangka pelaksanaan seluruh kegiatan yang diamanatkan sebagaimana telah terangkum dalam tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, Kecamatan Sambeng didukung dengan Personil, Sarana dan Prasarana serta Pembiayaan yang masing-masing dapat disampaikan sebagai berikut :

1) Personil

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Pemerintah Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan sebanyak 22 (dua puluh Tiga) pegawai, dengan status Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak 1 (Satu) pegawai dengan perincian sebagai berikut:

No	Jabatan Struktural	Jml	Pangkat/Gol. Ruang	Jml	Pendidikan formal	Jml	Ket
1.	Camat	1	Pembina (IV/a)	1	S-2	1	
2.	Sekretaris Kecamatan	1	Penata TK.1 (III/d)	1	S-2	1	
3.	Kepala Seksi	4	Penata TK.1 (III/d)	4	S1	4	
4.	Kasubag Umum	1	Penata (III/c)	1	SMA	1	
	Kasubag Keuangan	1	Penata Muda TK.I	1	S-1	1	
5.	Staf.	25	Penata Tk I (III/d)	-	-	-	
			Penata Muda Tk I (III/b)	-	-	-	
			Penata Muda (III/a)	2	S1	2	
			Pengatur Tk I (II/d)	-	-	-	
			Pengatur (II/c)	7	SMA	7	
			Pengatur Muda Tk.I (II/b)	-	-	-	
			Tenaga Kontrak Kabupaten	2	S-1	2	
			Tenaga Kontrak Kabupaten	2	SMA	2	
			TenagaKontrak Kecamatan	3	S-1	3	
			Tenaga Kontrak Kecamatan	3	SMA	3	

STRUKTUR ORGANISASI



Pemerintah Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten / Kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Camat berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

A. Camat

Camat mempunyai tugas :

Melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani urusan Otonomi Daerah di wilayah kerja

Kecamatan.

Untuk menjalankan tugas tersebut Camat mempunyai kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah, yang meliputi aspek :

- a. Perijinan
- b. Rekomendasi
- c. Koordinasi
- d. Pembinaan
- e. Pengawasan
- f. Fasilitasi
- g. Penetapan
- h. Penyelenggaraan dan
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 49 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Lamongan, maka Camat mempunyai tugas umum pemerintahan yang meliputi :

- 1) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
- 2) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
- 3) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
- 4) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 5) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan ;
- 6) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan ;

- 7) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai fungsi :

- 1) Pengelolaan administrasi dan urusan umum ;
- 2) Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan ;
- 3) Pelaksanaan urusan organisasi, tatalaksana dan kehumasan ;
- 4) Pelaksanaan urusan kepegawaian ;
- 5) Pelaksanaan urusan keuangan ;
- 6) Pelaksanaan urusan program ;
- 7) Pelayanan teknis administratif kepada Camat dan semua satuan unit kerja di tingkat Kecamatan ;
- 8) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata usaha kearsipan ;
- b. Melakukan pengurusan administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas kehumasan dan keprotokolan ;
- c. Melakukan pengelolaan urusan organisasi dan tatalaksana ;
- d. Melakukan urusan kepegawaian ;
- e. Mengumpulkan, menginventarisir dan mensistematisasikan data dalam rangka perumusan dan penyusunan program ;
- f. Menyusun program rencana kegiatan ;
- g. Mengelola, memelihara dan menyajikan data kegiatan ;
- h. Menyiapkan bahan dalam rangka menyusun rencana program serta bahan-bahan rapat koordinasi ;
- i. Mempelajari dan menganalisa realisasi hasil kegiatan dan permasalahan dengan memperhatikan program dan rencana kerja ;
- j. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan hasil-hasilnya ;

- k. Menyusun hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dan permasalahan sebagai bahan penyusunan program berikutnya ;
- l. Menyusun laporan berkala tentang pelaksanaan program dan kegiatan kantor ;
- m. Menyiapkan bahan publikasi program dan hasil-hasilnya bagi masyarakat luas ;
- n. Membantu mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ;
- o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas :

- a. Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan ;
- b. Melakukan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji, pegawai dan hak-haknya ;
- c. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan ;
- d. Melakukan verifikasi pengelolaan anggaran keuangan belanja kantor ;
- e. Melakukan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan ;
- f. Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana kantor ;
- g. Melakukan pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang-barang kantor ;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Seksi Tata Pemerintahan

Tata Pemerintahan mempunyai tugas :

- 1) Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan SKPD dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ;
- 2) Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan SKPD dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ;
- 3) Melakukan evaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan ;
- 4) Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan ;
- 5) Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa dan/atau Kelurahan ;
- 6) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Lurah ;
- 7) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Desa dan/atau Kelurahan ;
- 8) Melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan ;
- 9) Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan ;
- 10) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

D. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas :

- 1) Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan ;
- 2) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta pemerintah maupun swasta yang

mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan ;

- 3) Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta ;
- 4) Melakukan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- 5) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan kegiatan kesejahteraan sosial ;
- 6) Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan ;
- 7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

- 1) Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan ;
- 2) Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan ;
- 3) Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum ;
- 4) Melakukan koordinasi dengan SKPD yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan Peraturan Perundang-undangan ;
- 5) Melakukan koordinasi dengan SKPD yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
- 6) Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan di wilayah kerja Kecamatan ;

- 7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas :

- 1) Melakukan pengumpulan data bidang ekonomi dan pembangunan di tingkat Kecamatan meliputi sumber daya alam (pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, kelautan dan peternakan), bina usaha (industri, perdagangan, koperasi, usaha kecil, mikro dan menengah, budaya dan pariwisata, perhubungan dan penanaman modal), pertambangan, energi dan lingkungan hidup ;
- 2) Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan SKPD dibidang penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan pembangunan di tingkat Kecamatan
- 3) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan dibidang ekonomi dan pembangunan ;
- 4) Menyiapkan bahan fasilitasi, rekomendasi dan perijinan di tingkat Kecamatan
- 5) Melakukan koordinasi dengan SKPD dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di tingkat Kecamatan ;
- 6) Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di tingkat Kecamatan
- 7) Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di tingkat Kecamatan ;
- 8) Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya
- 9) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan pada masyarakat di tingkat Kecamatan ;

- 10) Melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan dibidang ekonomi dan pembangunan ;
- 11) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sarana dan Prasarana :

Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sarana dan prasarana yang tersedia relatif mencukupi, dengan gambaran sebagai berikut :

- a. Kantor dan Pendopo = 1 (satu) unit dan dalam kondisi baik ;
- b. Rumah Dinas Camat = 1 (satu) unit, kondisi kondisi baik ;
- c. Kendaraan Dinas Camat Roda 4 = 1 (satu) unit, kondisi baik ;
- d. Kendaraan Roda 2 (dua) = 41 (empat puluh satu), kondisi baik;
- e. Komputer = 19 (sembilan belas), kondisi baik;
- f. Laptop 7 (tujuh) = kondisi baik;
- g. Radio HT / RDG = 1 (satu) unit dalam kondisi baik ;
- h. LCD Proyektor = 1 (satu) unit dalam kondisi baik.

3. Pembiayaan :

Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sambeng didukung dengan dana operasional dari APBD Kabupaten Lamongan sebesar Rp. 2.916.311.400,- (Dua Miliar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Empat Ratus Rupiah) selama 1 (satu) tahun anggaran. yang pos anggarannya masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) pada Kantor Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan.

*Daftar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kecamatan Sambeng kabupaten Lamongan Tahun 2019*

KODE						URAIAN	APBD PAK 2019
1						2	
6	1	1	06			KEWILAYAHAN	
6	1	1	13	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	166.740.100,00
6	1	1	13	1	1	Penyediaan Jasa Perkantoran	120.000.000,00
6	1	1	13	1	2	Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran	
6	1	1	13	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	71.400.000,00
6	1	1	13	2	3	Pengadaan Peralatan dan Pengadaan Gedung Kantor	130.000.000,00
6	1	1	13	2	4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	150.000.000,00
6	1	1	13	2	6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	35.000.000,00
6	1	1	13	2	7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaaraan Dinas/Operasional	
6	1	1	13	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	11.500.000,00
6	1	1	13	5	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	
6	1	1	13	6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	13.600.000,00
6	1	1	13	6	1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Secara Berkala	30.000.000,00
6	1	1	13	6	2	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	
6	1	1	13	15		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan	40.000.000,00
6	1	1	13	15	2	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	
6	1	1	13	16		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan	10.000.000,00
6	1	1	13	16	1	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan	10.000.000,00
6	1	1	13	16	2	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	20.000.000,00
6	1	1	13	16	3	Pengendalian Keamanan Lingkungan	50.000.000,00
6	1	1	13	16	4	Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan PERDES	20.000.000,00
6	1	1	13	16	5	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa	15.000.000,00
6	1	1	13	16	11	Fasilitas kemiskinan	20.000.000,00
6	1	1	20	1	12	Fasilitas dan desa	15.000.000,00
6	1	1	20	6	14	Fasilitas pengembangan potensi ekonomi	166.740.100,00
JUMLAH							922.240.100,00

3. Sistematika Penyajian Lkjip

LKjIP Kecamatan Sambeng Tahun 2019, Disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang penyusunan LKjIP Kecamatan Sambeng, dan serta sistematika penulisan, Gambaran Umum Organisasi dan data Personil, Sarana dan Prasarana Pembiayaan

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Berisi rencana strategis, Visi dan Misi Kecamatan Sambeng serta tujuan, sasaran dan indicator sasaran, program dan kegiatan.

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Berisi tentang capaian kinerja tahun 2019, Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2019, Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2019 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Analisis Kinerja antara lain Analisis penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau peningkatan / Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis efisiensi penggunaan sumberdaya (dana sarana prasarana & SDM), Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan realisasi anggaran tahun 2019.

BAB IVPENUTUP

Yang Berisikan Kesimpulan dan Saran.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

1. RENCANA STRATEGI :

1) VISI :

”Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera Dan Berdaya Saing”

Dari visi tersebut menggambarkan harapan terwujudnya pelayanan prima kepada semua lapisan masyarakat Kecamatan Sambeng, yang lebih mantap, terarah, terkendali dan berkesinambungan serta merangsang masyarakat untuk lebih maju, mandiri dan sejahtera.

M i s i

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Adapun misi Kecamatan Sambeng sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan
2. Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah
3. Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan
4. Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik
5. Memantapkan kehidupan masyarakat yang tentram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal

Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal

Instansi Pemerintah, mengetahui peran dan program - program serta hasil yang akan diperoleh di Tahun 2018.

2) Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Tujuan ini dirumuskan untuk mempertajam fokus pelaksanaan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas dalam melaksanakan misi tersebut. Berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan, maka Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan menetapkan Tujuan sebagai berikut :

- a Terwujudnya peningkatan pelayanan yang profesional
- b Meningkatnya kapabilitas sumber daya aparatur yang profesional

2. SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN

a. Sasaran

- 1. Meningkatnya kualitas pelayanan Publik di Kecamatan Sambeng
- 2. Meningkatkan Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa

b. Indikator

- 1. a. Prosentase Capaian Layanan Publik (PATEN)
b. Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
- 2. a. Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pembangunan fisik yang di tindak lanjuti dalam satu tahun
b. Prosentase Desa yang sudah Menyusun Anggaran dengan Basis Kinerja

3. PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
6. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan

4. RENCANA KINERJA TAHUN 2019

Rencana Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategi yang berupa Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
6. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
6	1											
6	1	1										
6	1	1	1	Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah tenaga administrasi/Teknis Kegiatan	Kec. Sambeng	4 orang	45.500.000	APBD Kab		5 orang	47.250.000
					Jumlah tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Sambeng	2 rekening	26.500.000	APBD Kab		2 rekening	27.825.000
					Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	Kec. Sambeng	7 item	15.000.000	APBD Kab		7 item	15.750.000
					Terbitnya STNK Kendaraan Dinas Roda 4	Kec. Sambeng	1 unit mobil	1.500.000	APBD Kab		1 unit mobil	1.575.000
					Jumlah Jasa Pelayanan Kantor	Kec. Sambeng	5 orang	45.500.000	APBD Kab		5 orang	47.250.000
6	1	1	2	Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran	Jumlah Alat Tulis Kantor	Kec. Sambeng	24 item	24.490.000	APBD Kab		24 item	25.714.500
					Jumlah komponen instalansi listrik/Penerangan bangunan kantor	Kec. Sambeng	12 item	4.000.000	APBD Kab		3 item	4.200.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		Jumlah perlengkapan komputer dan printer	Kec. Sambeng	1 item	6.000.000	APBD Kab		1 item	6.300.000			
		Jumlah cetakan dan penggandaan kantor	Kec. Sambeng	5 item	30.000.000	APBD Kab		5 item	31.500.000			
		Jumlah bahan bacaan	Kec. Sambeng	2 item	5.500.000	APBD Kab		2 item	5.775.000			
		Jumlah makanan dan minuman	Kec. Sambeng	2.100 box 112 dus	30.360.000	APBD Kab		2.100 box 112 dus	31.878.000			
6	1	2										
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										
6	1	2	6	Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli	Kec. Sambeng	5 unit	35.000.000	APBD Kab		5 unit	36.750.000
6	1	2	6	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung yang di bangun	Kec. Sambeng	1 gedung	190.000.000	APBD Kab		1 gedung	199.500.000
6	1	2	6	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung yang dipelihara	Kec. Sambeng	4 gedung dan Pagar Keliling	35.000.000	APBD Kab		4 Gedung dan Pagar Keliling	36.750.000
6	1	2	6	Pemeliharaan	Jumlah Kendaraan	Kec.	1 unit mobil	30.000.000	APBD Kab		1 unit mobil	31.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas/operasional yang dipelihara	Sambeng	5 unit sepeda motor				5 unit sepeda motor			
6	1	6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							
6	1	6	1	Penyusunan laporan keuangan secara berkala	Jumlah laporan keuangan	Kec. Sambeng	2 laporan	5.000.000	APBD Kab	1 laporan	5.250.000
6	1	6	2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi	Jumlah dokumen yang dibuat	Kec. Sambeng	4 dokumen	5.000.000	APBD Kab	4 dokumen	5.250.000
6	1	15		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan							
6	1	15	2	Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Jumlah Pelayanan yang dilaksanakan selama satu tahun	Kec. Sambeng	6 item	40.000.000	APBD Kab	6 item	42.000.000
6	1	17		Program Penyelenggaraan							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan											
6	1	17	1	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Jumlah Musrenbang yang dilaksanakan	Kec. Sambeng	2 kali	10.000.000	APBD Kab		2 kali	10.500.000
6	1	17	2	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Jumlah Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Kec. Sambeng	3 kali	10.000.000	APBD Kab		3 kali	10.750.000
6	1	17	3	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah Sosialisasi dan Pembinaan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Kec. Sambeng	4 kali	20.000.000	APBD Kab		4 kali	20.250.000
6	1	17	4	Monitoring Dan Evaluasi Apbd Desa	Jumlah Monitoring dan evaluasi APBD Desa	Kec. Sambeng	22 desa	50.000.000	APBD Kab		22 desa	52.500.000
6	1	17	5	Fasilitasi Penyelenggaraan	Jumlah Pembinaan dan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Kec. Sambeng	22 desa	20.000.000	APBD Kab		22 desa	20.250.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	Pemerintahan Desa	Desa	g									
6	1	17	6	Fasilitasi Kemiskinan	Jumlah pembinaan	Kec. Samben g	2 kali	15.000.000	APBD Kab		2 kali	15.750.000
6	1	1	1	Fasilitasi dana Desa	Jumlah Fasilitasi Dana Desa	Kec. Samben g	2 kali	15.000.000	APBD Kab		2 kali	15.500.000
6	1	1	1	Fasilitasi Pengembangan potensi ekonomi	Jumlah Fasilitasi pengembangan potensi ekonomi	Kec. Samben g	2 kali	15.000.000	APBD Kab		2 kali	15.500.000
Jumlah								738.410.000				775.080.500

5. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi maka dibutuhkan perjanjian kinerja untuk mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran di Kecamatan Sambeng di laksanakan Melalui kegiatan Sebagai berikut :

a. Penyediaan Jasa Perkantoran

Adapun anggaran Penyediaan Jasa Perkantoran (sesuai pagu APBD) sebesar **Rp. 286.740.100,-**

b. Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran

Adapun anggaran Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran (sesuai pagu APBD) sebesar **Rp. 120.000.000**

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur di Kecamatan Sambeng dilaksanakan Melalui kegiatan Sebagai berikut :

a. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Adapun anggaran Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor kantor (sesuai pagu APBD) sebesar **Rp. 71.400.000**

b. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Adapun anggaran Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor kantor (sesuai pagu APBD) sebesar **Rp. 130.000.000**

c. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Adapun anggaran Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung kantor (sesuai pagu APBD) sebesar **Rp. 150.000.000**

d. Pemeliharaan rutin atau berkala Kendaraan Dinas atau Operasional

Adapun anggaran Pemeliharaan rutin atau kendaraan dinas atau operasional (sesuai pagu APBD) sebesar **Rp. 35.000.000**

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur di Kecamatan Sambeng di laksanakan Melalui kegiatan Sebagai berikut :

a. Program Pendidikan dan pelatihan formal

Adapun Pendidikan dan pelatihan formal (sesuai pagu APBD) sebesar **Rp 11.500.000.**

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan di Kecamatan Sambeng di laksanakan Melalui kegiatan Sebagai berikut :

a. Penyusunan Pelaporan Keuangan Secara Berkala

Adapun Penyusunan Pelaporan Keuangan Secara Berkala (sesuai pagu APBD) sebesar **Rp. 30.000.000.**

b. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

Adapun Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi (sesuai pagu APBD) sebesar **Rp. 30.000.000**

5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan di Kecamatan Sambeng di laksanakan Melalui kegiatan Sebagai berikut :

a. Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan

Adapun Alokasi Sarana prasarana pelayanan administrasi terpadu kecamatan sebesar **Rp. 40.000.000**

6. Progam Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Kecamatan

Progam Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Kecamatan di Kecamatan Sambeng di laksanakan Melalui kegiatan Sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Musyawarah Perencana Pembangunan

Adapun Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (sesuai pagu APBD) sebesar **Rp. 10.000.000,00** Dan

b. Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Adapun Pelaksanaan Pembinaan Organisasi Kepemudaan (sesuai pagu APBD) sebesar **Rp. 10.000.000**

c. Pengendalian Keamanan Lingkungan

Adapun Pelaksanaan Pengendalian Keamanan Lingkungan (sesuai pagu APBD) sebesar **Rp. 20.000.000** Dan

d. Monitoring Dan Evaluasi APBD Desa dan Perdes

Adapun Monitoring Dan Evaluasi APBD Desa DAN Perdes (sesuai pagu APBD) sebesar **Rp. 50.000.000** Dan

e. Fasilitas Kemiskinan

Adapun Fasilitas Kemiskinan (sesuai pagu APBD) sebesar **Rp. 15.000.000,00** Dan

f. Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Adapun Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa (sesuai pagu APBD) sebesar **Rp. 20.000.000**

g. Fasilitas Dan Desa

Adapun Fasilitas Dan Desa (sesuai pagu APBD) sebesar **Rp. 20.000.000**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Secara umum Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai pelaksana pembangunan di Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan dan secara proporsional telah berjalan dengan baik.

Akuntabilitas Kinerja menggambarkan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan dari penjabaran visi, misi dan strategi yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Sasaran yang telah dipilih dan ditetapkan indikator sasaran dan indikator kinerja. Indikator tersebut merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif tingkat pencapaian suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana tolok ukur kinerja kebijakan Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021, dengan memperhitungkan indikator masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome).

1. Perbandingan Target dan Realisasi tahun 2019

Sesuai dengan hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Sambeng adalah tercapai rata-rata sebesar **90 %**, yang didukung oleh semua elemen masyarakat dengan melaksanakan Program dan kegiatan yang ditujukan dan diharapkan bermanfaat bagi segala lapisan masyarakat, sebagai berikut :

KODE					URAIAN	APBD PAK 2018	Realisasi Fisik (%)	APBD PAK 2019	Realisasi Fisik (%)	
1					2	4	5	6	7	
6	1	1	13		KEWILAYAHAN					
6	1	1	13	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
6	1	1	13	1	1	Penyediaan Jasa Perkantoran	131.842.900,00	86,85 %	164.740.100,00	94,55 %
6	1	1	13	1	2	Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran	94.253.600,00	74,35 %	120.000.000,00	77,81 %
6	1	1	13	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
6	1	1	13	2	3	Pengadaan Peralatan dan Pengadaan Gedung Kantor	33.250.000,00	80 %	71.400.000,00	100 %
6	1	1	13	2	4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	60.000.000,00	100 %	130.000.000,00	92,85 %
6	1	1	13	2	6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	150.000.000,00	99,3 %	150.000.000,00	99,75 %
6	1	1	13	2	7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	35.000.000,00	74,98 %	35.000.000,00	71,09 %
6	1	1	13	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
6	1	1	13	5	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	18.800.000,00	100 %	11.500.000,00	91,96 %
6	1	1	13	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
6	1	1	13	6	1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Secara Berkala	4.850.000,00	97 %	13.600.000,00	74,42 %
6	1	1	13	6	2	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	5.000.000,00	100 %	30.000.000,00	69,67 %
6	1	1	13	15	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan					
6	1	1	13	15	2	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	5.000.000,00	100 %	40.000.000,00	97,25 %
6	1	1	13	16	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan					
6	1	1	20	1	6	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan	10.000.000,00	96,99 %	10.000.000,00	100 %
6	1	1	20	1	6	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	10.000.000,00	100 %	10.000.000,00	100 %
6	1	1	20	1	6	Pengendalian Keamanan Lingkungan	21.780.000,00	100 %	20.000.000,00	71,48 %
6	1	1	20	1	6	Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan PERDES	50.000.000,00	74,22 %	50.000.000,00	100 %
6	1	1	20	1	6	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa	20.000.000,00	76,60%	20.000.000,00	73,06 %
6	1	1	20	1	6	Fasilitas Kemiskinan	10.650.000,00	33 %	15.000.000,00	98 %
6	1	1	20	1	6	Fasilitas dana Desa	20.000.000,00	78,09 %	20.000.000,00	100 %
6	1	1	20	1	6	Fasilitasi pengembangan potensi ekonomi	15.000.000,00	71,00 %	15.000.000,00	
JUMLAH						695.426.500,00	89,19 %	926.240.100,00	90.54 %	

1. Realisasi Kinerja dibanding dengan target kinerja Tahun 2019

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan	1. Nilai IKM layanan Kecamatan (PATEN)	B	A	80
2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan	2. Prosentase pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu	286.740.100	840.408.176,-	90,54 %
3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan	3. Prosentase keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan	10.000.000	10.000.000	100 %
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan	4. Nilai SAKIP Kecamatan	B	A	84

2. Realisasi kinerja serta capaian kinerja dibanding tahun lalu dan sebelumnya

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
			Tahun 2018	Tahun 2019
1	2	3	4	5
1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan	1. Nilai IKM layanan Kecamatan (PATEN)	A	BB	80
2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan	2. Prosentase pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu	286.740.100	840.408.176,-	90,54 %
3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan	3. Prosentase keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan	10.000.000	10.000.000	100 %
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan	4. Nilai SAKIP Kecamatan	B	BB	80

2. Analisa Kinerja

2.1 Analisa Penyebab Keberhasilan atau kegagalan

- Program Perencanaan pembangunan berhasil karena pihak pemerintah mensosialisasikan dengan masyarakat
- Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup karena pihak pemerintah mengadakan Grend and Clean sehingga masyarakat antusias untuk menjaga kebersihan lingkungan
- Program Peningkatan Peningkatan Peran serta kepemudaan dalam peningkatan tersebut berhasil karena pihak pemerintah mengadakan sosialisasi dengan pemuda yang ada di kecamatan lamongan dan masih butuh peningkatan antara pemerintah dengan pemuda yang ada di wilayah kecamatan Sambeng
- Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan sangat berhasil karena adanya kordinasi antara pihak kecamatan dengan kelurahan/ desa se kecamatan Sambeng
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran mempunyai 10 (sepuluh) kegiatan dengan berhasilnya kegiatan tersebut, maka kecamatan memilih untuk pelyanan yang terbaik bagi masyarakat sehingga mendapat kenyamanan dalam melayani masyarakat.
- Program peningkatan sarana dan prasarana mempunyai 5 (lima) Kegiatan keberhasilan program tersebut maka kantor kecamatan Sambeng memenuhi kebutuhan karyawan sehingga terjadinya kenyamanan dalam melakukan kegiatan dan adapula kendala bagi rehap kantor yang selama ini masih banyak yang dibenahi sehingga kurangnya kenyamanan bagi karyawan kantor kecamatan Sambeng.

- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan mempunyai 5 (lima) Kegiatan dalam program tersebut sangat berhasil sehingga cepatnya pelaporan kinerja dalam kantor kecamatan menjadi lancar
- Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun Desa mempunyai 2 (dua) Kegiatan keberhasilan program tersebut karena koordinasi dengan Kelurahan dan RT se kecamatan Sambeng berjalan dengan lancar sehingga masyarakat antusias untuk mengikuti lomba Greend and Clean sehingga dapat terbangunnya dengan baik.

2.2 Analisis efisiensi pengguna sumber daya

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, efisiensi adalah hubungan antara masukan dan keluaran, efisiensi merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan digunakan oleh organisasi perangkat pemerintahan untuk mencapai tujuan organisasi perangkat pemerintahan dapat mencapai manfaat tertentu. Efisiensi juga mengandung beberapa pengertian antara lain :

- Efisiensi pada sektor hasil dijelaskan dengan konsep masukan- keluaran (input/output)
- Efisiensi pada sektor pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan pengorbanan seminimal mungkin; atau dengan kata lain suatu kegiatan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai sasaran dengan biaya yang ditentukan dalam APBD.
- Efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dicapai dengan memperhatikan aspek hubungan dan tatakerja antar instansi pemerintah daerah dengan

memanfaatkan potensi dan keanekaragaman suatu daerah.

Faktor penentu efisiensi adalah :

- Faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan.
- Faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan baik itu struktural maupun fungsional.
- Faktor sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja, maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana keuangan.
- Faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksanaannya baik pimpinan maupun masyarakat.
- Faktor pimpinan dalam arti kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor tersebut kedalam suatu usaha yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai sasaran yang dimaksud

2.3 Analisis Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dari satu indikator kinerja dapat diuraikan hal-hal yang menjadi faktor keberhasilan, kegagalan/hambatan dan kendala serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diantaranya yaitu :

- a) Faktor keberhasilan
 - Perencanaan kerja yang terprogram;
 - Koordinasi yang baik antara Kecamatan dan kelurahan/desa baik masyarakat maupun pemuda yang ada diwilayah kecamatan Lamongan;
 - Meningkatnya pelayanan masyarakat dengan tertib dan profesional;

- Ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai;
 - Tersedianya kemampuan dan kemauan kerja dari SDM terkait;
 - Adanya dukungan positif dan persetujuan kegiatan dari pimpinan.
- b) Faktor kegagalan
- Tidak terdapat faktor yang menyebabkan kegagalan dalam program ini.
- c) Langkah-langkah antisipatif
- Koordinasi yang lebih terencana dan terorganisir antara Kecamatan dengan penyelenggara diklat dan pihak-pihak terkait lainnya;
 - Kesiapan alokasi APBD;
 - Kesiapan personil yang akan mengikuti diklat.

BAB IX

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2019 Kantor Kecamatan Sambeng dibuat sebagai wujud pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang merupakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.

Kantor Kecamatan Sambeng menetapkan kegiatan prioritas yang diharapkan mampu memenuhi target sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam hal pelaksanaan kegiatan meskipun menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan, tetapi secara umum kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik berkat kerjasama dan koordinasi dari seluruh penyelenggara pemerintah di Kecamatan Sambeng serta dukungan dan binaan dari Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Demikian Laporan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), selanjutnya untuk menjadikan periksa.

CAMAT SAMBENG

HERSAD,SH.MM

Pembina

NIP. 19630603 198603 1 021

**LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KECAMATAN SAMBENG
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

KABUPATEN : Lamongan

NAMA PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Sambeng

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Kewilayaan

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program NonTeknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program NonTeknis)	1. Program Peningkatan kualitas Pelayanan di Kecamatan Sambeng Rp. 40.000.000,00 Realisasi Rp. 40.000.000,00 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Kecamatan Rp.160.000.000,00	2 Program	Lihat di APBD Lampiran I.3 (MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN)

						Realisasi Rp. 141.065.416,00		
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah cq Kementerian /LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Apabila Ada, Sebutkan ada banyak yang terdiri dari 1. SOP ttg IMB 2. SOP ttg HO 3. SOP ttg Pelayanan Legalisasi 4. SOP Surat Masuk & Keluar 5. SOP ttg Pelaksanaan Absensi Pegawai 6. SOP ttg KK 7. SOP ttg KTP 8. SOP ttg Pindah	6 SOP	SOP yang dimaksud adalah SOP teknis. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	PERDA Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Ada	Sumber data di Bagian Hukum

3	PENATAAN KELEMBAG AAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jabatan yang ada sebanyak 8 Jabatan yang harus ada, sebanyak 8	100%	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah
			5	Keberadaan jabatan Fungsional dalam Struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional Dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,	tidak ada	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2019

4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH		6	Rasio PNS	Jumlah PNS perangkat daerah terhadap total PNS	<ul style="list-style-type: none"> - PNS Perangkat Daerah Sebanyak 22 daerah, sebanyak - Total PNS Kabupaten Sebanyak Kabupaten sebanyak 9.159 personel 	1 : 24 (0,24%)	Sumber data mengacu pada data DUK perangkat daerah terakhir atau data yang berasal dari BKD
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x100%	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat yang Memenuhi syarat diklatpim sebanyak 7 Org - Pejabat yang adas ebanyak 8 Org 	87%	Sumber data mengacu pada data DUK perangkat daerah terakhir atau data yang berasal dari BKD
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan 8 Orang - Pejabat yang ada se banyak 8 Org 	100%	Sumber data mengacu pada data DUK perangkat daerah terakhir atau data yang berasal dari BKD

5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki perangkat daerah	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA - RENJA - RKAPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada atau Tidak Ada dokumen yang dimaksud, sebanyak 3 jenis, yang terdiri dari: -RENJA -RENSTRA -DPA/RKA	3 Dok	Sumber data mengacu pada data perencanaan perangkat daerah terakhir atau data yang berasal dari Bappeda
		Sinkronisasi program RENJA perangkat daerah dengan program RKPD	10	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	- Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak 6 program - Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak 6 program	100 %	Sumber data mengacu pada data perencanaan perangkat daerah terakhir atau data yang berasal dari Bappeda

	Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 6-program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. 	100%	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2019 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program - Jumlah Program dalam DPA Perangkat 	100%	Sumber data dari dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2019 dan dokumen DPA- Perangkat Daerah ybs tahun 2019.

						Daerah, sebanyak 6 program.		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp 2.665.360.100 - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 3.638.634.831.480.51	100%	Sumber data dari APBD tahun 2019 terakhir. (anggaran)
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp. 2.507.689.771 - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp. 2.875.509.706.577.60	100%	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah,	100 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019 terakhir.

		Perangkat Daerah	Daerah x 100%	sebesar Rp.2.507.689.771 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 2.875.509.706.577 .60			
		16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp.166.728.159 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp2.507.689.711	100 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019 terakhir.
	Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, 1. CALK 2. NERACA 3. LRA	3 Dok.	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)

7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. 1. KIB,A,B,C,D, E,F 2. KIR	ADA	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100%	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp..0 - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah,Sebesar Rp.3.079.857.156	0 %	Pembilang : 1) Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 2) Aset layak pakai tetapi tidak digunakan /dimanfaatkan Penyebut : Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan /dimanfaatkan

8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi: 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Media Masa	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Informasi 2. Kotak Saran 3. Informasi Fasilitas Pelayanan 4. Media Masa (Instagram, Website, Facebook) 5. Pos Pengaduan	5 Jenis	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (data foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang PATEN	ADA	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda/ Perangkat Daerah.